

Sekularisme Dalam Pendidikan Dan Politik Di Indonesia

Heri Supriyanto¹ Ita Rodiah²

^{1,2} Interdisciplinary Islamic Studies UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: 21200011050@student.uin-suka.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berusaha untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan tentang sekularisme dalam pendidikan dan politik di Indonesia. Bagaimanapun sekularisasi pendidikan dan politik di Indonesia telah berlangsung sejak dahulu kala bahkan sebelum Indonesia merdeka. Penelitian ini adalah penelitian *library research* dengan jenis deskriptif, pengumpulan datanya diambil dari berbagai buku dan artikel jurnal terkait dengan tema dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus tentang mencari versi sekularisme untuk Indonesia tidak bisa menafikkan peran agama Islam sebagai kekuatan politis di Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas Indonesia berpengaruh besar dalam percaturan politik Indonesia. Karena itu perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari negosiasi kreatif antara sekularisme dan agama. Negosiasi ini misalnya muncul dalam perumusan Sila Pertama Pancasila.

Kata kunci: Sekularisme, Pendidikan, Politik, Indonesia

Abstract

This research seeks to provide an overview or description of secularism in education and politics in Indonesia. However, the secularization of education and politics in Indonesia has been going on for a long time, even before Indonesia's independence. This research is a library research with a descriptive type, the data collection is taken from various books and journal articles related to the theme and discussion. The results of the research show that the discourse on seeking a version of secularism for Indonesia cannot deny the role of Islam as a political force in Indonesia. Islam as Indonesia's majority religion has a major influence on Indonesian politics. Therefore the journey of the Indonesian nation cannot be separated from creative negotiations between secularism and religion. This negotiation, for example, appears in the formulation of the First Precepts of Pancasila.

Keywords: Secularism, Education, Political, Indonesia

PENDAHULUAN

Sekularisme adalah isu yang menarik untuk dikaji. Sekularisme menjadi semakin menarik karena mengetengahkan tentang sebuah fakta bahwa di dalam sebuah Negara hal itu tidak bisa terlepas dalam hubungannya dengan agama. Ya hubungan antara agama dan Negara.

Perdebatan antara yang mendukung dan menentang sekularisme bersumber dari perbedaan dalam memahami konsep sekularisme. Menurut Talal Asad sekularisme sebagaimana praktek di Barat bukanlah semata tentang doktrin politik yang selama ini sering dipahami kebanyakan sarjana yakni "pemisahan agama dari institusi-institusi negara" sebab konsep seperti itu juga ditemui dalam imperium-imperium Kristen dan Islam pada abad pertengahan. Yang sangat berbeda dari era sebelumnya, sekularisme mengasumsikan konsep baru tentang "agama", "etika" dan "politik". Di

negara Barat, sekularisme selain merupakan political medium (media politik) yang mentransendenkan praktek-praktek tertentu yang membedakan individu-individu yang terartikulasi melalui kelas, gender dan agama, tetapi juga merupakan “sebuah konsep tentang perilaku (sikap) tertentu, pengetahuan dan selera dalam kehidupan modern”. (Talal Asad: 25)

Berdasarkan hal itu, menurut Abdol Karim Soroush, pemikir kontemporer Iran, pengertian sekularisme perlu dibedakan secara politik dan filosofi. Sekularisme dalam pengertian politik adalah pemisahan agama dari negara. Sedangkan dalam pengertian filosofi, sekularisme merupakan pandangan hidup yang didasarkan hanya materi atau masalah duniawi semata, karena itu menolak terhadap agama atau keberadaan Tuhan.

Masalah sekularisme di Indonesia bukan topik yang baru. Sejak zaman kemerdekaan ketika Piagam Jakarta telah dibahas, masalah peran agama dalam politik menjadi isu hangat. Pada masa Orde Lama, Piagam Jakarta tidak diterima tetapi kontroversi mengenai peran agama, khususnya Islam, tidak menghilang.

Di dalam perkembangan politik dan budaya di Indonesia kadang-kadang isu sekularisme dan hak-hak individu muncul sebagai wacana publik. (Hamidi: 70) Kalau tidak jeli kita tidak dapat melihat fenomena sekularisme sektor publik ini, karena kita melihat jumlah tempat ibadah yang semakin bertambah; jamaah haji dari Indonesia juga terbanyak di dunia dan berbagai simbol keagamaan semarak dan mencolok dalam kehidupan sehari-hari. Dampak fenomena sekularisme sektor publik ini sungguh sangat fatal, kita gagal mewujudkan salvation di dunia ini, seperti gap si kaya dan si miskin begitu mencolok. Memang sekularisme sektor publik di Barat sangat mencolok, tetapi Barat berhasil mewujudkan salvation di dunia ini seperti relatif terjaminnya kesejahteraan, keadilan, dan keamanan. Hal ini sebagai hasil dari proyek sekularisasi, yaitu adanya pemisahan manajemen sektor publik (urusan negara) dan manajemen sektor privat (urusan agama) sehingga sektor publik terhindar dari politisasi agama.

Sekularisme sebagai paham yang terus disebarakan mengakibatkan kehidupan manusia terfokus terhadap dunia dan tidak menyandarkan norma-norma hidup terhadap agama. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Islam yang bertujuan untuk menyeru manusia ke jalan Tuhan, sedangkan sekularisme menjauhkan manusia dari jalan Tuhan. Paham sekularisme ini tentu sangat bertentangan dengan akidah dan nilai-nilai ajaran Islam yang sangat menekankan kepada keimanan, khususnya kepada Allah SWT. (Setyawan: 2020).

Tulisan ini akan berusaha untuk memberikan gambaran tentang sekularisme yang terjadi di Indonesia yang meliputi sekularisme dalam pendidikan dan politik.

METODE

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau penelitian kepustakaan dengan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini di lakukan dengan memahami dan menganalisis berbagai tulisan atau karya-karya sebelumnya.

Pengumpulan datanya di ambil dari berbagai buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan tema dan pembahasan seperti buku dan artikel jurnal yang berkaitan dengan sekularisme seperti sekularisme yang terjadi dalam dunia pendidikan dan politik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sekularisme di Indonesia

Istilah sekularisme mula di perkenalkan pada tahun 1851 oleh seorang penulis British bernama Holyoake (1896). Walaupun demikian, ini bukanlah bermaksud bahwa pemahaman sekular itu tidak wujud sebelum tahun tersebut. Ini karena sekularisme senantiasa dikaitkan dengan kebebasan berpikir. Konsep pikiran bebas ini telah ada di sepanjang sejarah manusia. Pikiran bebas merupakan satu konsep yang membawa maksud manusia mempunyai kebebasan berpikir tanpa dipengaruhi berbagai unsur-unsur luar yang sudah biasa diterima oleh masyarakat seperti otoritas, tradisi atau sistem kepercayaan yang sudah ada dan diterima yang berkaitan dengan agama.

Secara umum istilah sekularisme sering di gunakan merujuk kepada sistem politik yang di laksanakan di sebuah negara. Sistem politik sekularisme memperjuangkan prinsip pemisahan antara agama dan negara. Dalam bahasa Inggris konsep ini sering dirujuk sebagai "*the separation of church and state*". Ini bermaksud agama tidak boleh campur tangan dalam urusan sebuah negara. Dan juga negara tidak boleh campur tangan dalam urusan agama.

Dalam konteks kesejarahan di Indonesia, proyek sekularisasi dapat ditelusuri melalui usaha kaum penjajah Belanda untuk melumpuhkan kekuatan dan gerakan perlawanan masyarakat bumiputra yang notabene beragama Islam. Ketika itu, bangsa Indonesia memilih untuk menjadikan Islam sebagai faktor pemersatu untuk melawan dan mengusir penjajah Belanda. Dengan dijadikannya sentimen keislaman tersebut sebagai faktor tunggal perlawanan terhadap kaum penjajah, tumbuhlah berbagai macam gerakan perlawanan dan pemberontakan yang dilancarkan oleh umat Islam untuk mengusir Belanda dari bumi Nusantara. Tentu saja, bagi pihak Belanda, gerakan seperti ini harus segera ditumpas. Sampai pada tahap tertentu, peperangan menjadi pilihan utama yang diambil Belanda. Namun, selain melancarkan tindakan penghapusan melalui perang, pihak Belanda juga melakukan beberapa tindakan lainnya yang lebih bersifat kultural, sosial, maupun pendidikan. Di antara tindakan tersebut adalah proyek sekularisasi di mana sepak terjang umat Islam dalam wilayah politik di tanah air, dibatasi dan bahkan dihapuskan sama sekali.

Masalah sekularisme di Indonesia memang bukan topik yang baru. Dalam perkembangan politik dan budaya di Indonesia kadang-kadang isu sekularisme muncul sebagai wacana publik. (Hertz, 2003: 60). Selain muncul sebagai sebuah wacana, ternyata sekularisme dan sekularisasi juga terjadi pada tataran praktis. Peristiwa bersejarah terkait perumusan Undang-undang Dasar 1945 dan penetapan sila-sila dalam Pancasila menyegarkan ingatan umat Islam akan kekalahan politik mereka pada masa itu. Disebut kekalahan karena kelompok Nasionalis-Islam yang mengajukan Islam sebagai dasar negara mesti berlapang dada menerima Pancasila sebagaimana diajukan oleh kelompok Nasionalis-Sekuler yang menginginkan sebuah negara yang netral terhadap kebinekaan. (Indah, 2002: 3)

2. Sekularisme dalam Pendidikan

Dalam konteks pendidikan, paradigma sekularisme ini telah masuk dalam dunia pendidikan di Indonesia, kenyataannya di sekolah-sekolah umum, masih ada pemisahan yang ketat antara ilmu-ilmu umum dan ilmu agama. Karena paradigma sekularisme yang sudah melekat pada pendidikan kita, upaya untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional pun harus mengalami berbagai macam kendala.

Situasi ini dapat diamati ketika pihak Belanda mengembangkan suatu sistem pendidikan atau persekolahan yang dimaksudkan untuk menyaingi dan menghancurkan sistem pendidikan tradisional (Islam) yang umumnya telah berkembang di wilayah-wilayah pedesaan. Pihak Belanda menginginkan lahirnya sebuah sistem pendidikan yang mengikuti cara pandang Barat serta terpisah dari nilai-nilai

Islam. Dengan begitu, diharapkan masyarakat menjadi sekuler dan terpisah dari ajaran Islam. Upaya ini membuahkan hasil. Cukup banyak elite politik atau priayi yang menyekolahkan anak mereka ke sekolah-sekolah tersebut. Realitas ini cukup berbeda dengan umat Islam atau kalangan santri yang biasanya menyekolahkan anak-anak mereka ke pesantren. Dengan beralihnya minat sebagian masyarakat dari sistem pendidikan pesantren kepada sistem pendidikan sekuler, ikatan kultural yang amat penting di antara dua kelompok masyarakat di atas benar-benar telah putus. (Jones, 1984: 84)

Pendidikan di era kontemporer menghadapi tantangan dari paham sekularisme untuk menerapkan nilai-nilai luhur dari ajaran agama dalam kehidupan sosial umat Islam yang sangat pragmatis, bahkan cenderung oportunis. Sekularisme dalam kehidupan kontemporer dikemas melalui globalisasi dan modernisasi, yang sejalan dengan perkembangannya peradaban Barat. Sekularisme merupakan ideologi yang mencoba menghilangkan nilai-nilai agama yang bersumber dari wahyu dalam kehidupan dunia, atau memisahkan kehidupan agama dan dunia (Ma'sa, 2020; Safi, 2011).

3. Sekularisme dalam Politik

Dalam dunia politik sekularisasi di istilahkan dengan "*desacralization of politics*" yang memiliki makna bahwa politik tidaklah sakral. Jadi unsur-unsur rohani dan agama harus di singkirkan dari politik. Hal ini menjadi syarat untuk melakukan perubahan politik dan sosial yang juga akan membenarkan munculnya proses sejarah. Segala macam kaitan antara kuasa politik dan agama dalam masyarakat apapun tidak boleh berlaku karena dalam masyarakat sekuler, tidak seorang pun memerintah atas otoritas "kuasa suci".

Sekularisasi tidak hanya terjadi di dalam dunia politik, ia juga terjadi dalam kehidupan, yaitu dengan penyingkiran nilai-nilai agama atau dekonsentrasi nilai-nilai. Tidak ada nilai yang mutlak. Sistem manusia sekuler harus dikosongkan dari nilai-nilai agama. Manusia sekuler percaya bahwa "wahyu langit" dapat dipahami karena hal itu terjadi dalam sejarah yang dibentuk oleh kondisi sosial dan politik tertentu.

Kekuasaan politik harus dilandaskan pada sumber legitimasi yang lebih modern dan rasional yaitu, para pelaku politik atau masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintahan yang mengaku didirikan di atas otoritas ketuhanan harus ditolak. Bagi masyarakat sekuler, domain politik adalah wilayah yang bersifat profan dan rasional. Maka, cara mengurusnya pun seharusnya dibentuk oleh pertimbangan atau kesepakatan-kesepakatan yang rasional pula.

Proyek sekularisasi di Indonesia direalisasikan oleh elite pemerintah melalui berbagai cara. Meskipun dilakukan secara represif oleh pemerintah, dilakukan secara sistematis dan terstruktur, serta mendapat dukungan segelintir pemikir Muslim, namun sekularisasi atas-bawah ini akan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh karakter sekularisasi itu sendiri yang bersifat elitis yang dipahami, disebarkan, dan dilakukan oleh para elite saja. Ia tidak dipikirkan, dihayati, dan dilakukan oleh publik atau masyarakat umum. Dengan berkaca pada kasus sekularisasi di Turki, usaha pemisahan Islam dan politik di Indonesia akan mengalami kegagalan yang serupa.

Terdapat kesulitan-kesulitan yang bersifat praktis dalam menerapkan gagasan sekularisme atau negara sekuler tersebut. Apakah negara tidak boleh turut campur dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah, mengatur pembangunan tempat ibadah, mengatur masalah halal/haram, mengumpulkan zakat, membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama atau keyakinan tertentu, dan sebagainya merupakan beberapa permasalahan yang tidak dapat dijawab secara tuntas oleh konsep negara sekuler tersebut. Ini berarti, pada tataran praktik, gagasan netralitas negara terhadap keberagaman hanyalah ilusi belaka, karena sangat sukar untuk direalisasikan. Kemudian terkait dengan isu politisasi agama, Sumargono menengarai, bahwa isu-isu seperti ini adalah perkara yang "nisbi" juga "subjektif" belaka

dan sengaja dihembuskan oleh beberapa kalangan tertentu yang tidak menginginkan penerapan nilai-nilai Islam secara menyeluruh di Indonesia. (Denny, 2000: 3-7)

Perlu diingat bahwa sekularisasi politik ini terkait erat dengan diskusi tentang hubungan Islam dan negara. Di Indonesia, pola hubungan Islam dan negara selalu mengalami proses pasang surut tergantung pada kondisi sosial dan politik yang tengah berlaku. Namun secara umum, pola hubungan tersebut dapat dikatakan cenderung bersifat antagonis (mutual antagonisme) dan ketidakpercayaan (distrust). Pada tataran wacana, sikap saling tidak percaya dan curiga ini merupakan bentuk nyata pergulatan pemikiran seputar batas antara ranah agama (Islam) dan negara (politik). (Budhy: 76)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sekularisasi pendidikan dan politik di tanah air telah berlangsung sejak dahulu kala bahkan sebelum Indonesia merdeka. Tercatat, proyek sekularisasi ini dapat ditelusuri melalui usaha kaum penjajah Belanda untuk melumpuhkan kekuatan dan gerakan perlawanan umat Islam Indonesia. Ketika itu, bangsa Indonesia memilih untuk menjadikan Islam sebagai faktor pemersatu untuk melawan dan mengusir penjajah Belanda.

Diskursus tentang mencari versi sekularisme untuk Indonesia tidak bisa menafikkan peran agama Islam sebagai kekuatan politis di Indonesia. Islam sebagai agama mayoritas Indonesia berpengaruh besar dalam percaturan politik Indonesia. Karena itu perjalanan bangsa Indonesia tidak terlepas dari negosiasi kreatif antara sekularisme dan agama. Negosiasi ini misalnya muncul dalam perumusan Sila Pertama Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Hertz, Jana C. "Sekularisme dan Hak-Hak Individu dalam Usaha Melawan Diskriminasi Rasial dan Etnis di Indonesia." *Antropologi* 72, 2003.
- Indriany, Indah Putri. 2002. "Islam dan Negara di Indonesia; Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid", Tesis Master. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Pascasarjana, Univeristas Indonesia.
- J.A., Denny. A. Sumargono, Kuntowijoyo, et al. 2000. *Negara Sekuler; Sebuah Polemik*. Jakarta: Putra Berdi
- Jazim, Hamidi., & Abadi, M Husnu, 2001, *Intervensi Negara Terhadap Agama*. Yogyakarta: UII Press.
- Jones, S. 1984. "The Contradiction and Expansion of the 'Umat' and The Role of the Nahdatul Ulama in Indonesia," *Indonesia*. New York: Southeast Asia Program Publications, Cornell University
- Ma'sa, L. (2020). Sekularisme sebagai Tantangan Dakwah Kontemporer. *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(2), 1–19. <https://doi.org/10.34005/ALRISALAH.V11I2.788>
- Rachman, Budhy Munawwar. 2010. *Argumen Islam Untuk Sekularisme: Islam Progresif dan Perkembangan Diskursusnya*. Jakarta: Grasindo.kari Bangsa.
- Setyawan, A. (2020). Dakwah yang Menyelamatkan: Memaknai Ulang Hakikat dan Tujuan Da'wah Islamiyah. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 15(02), 189-199. <https://doi.org/10.37680/adabiya.v15i02.487>